



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



(0295) 691331



<https://:dinlutkan.rembangkab.go.id>

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, Dinas Kelautan Dan Perikanan tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, Januari 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda

NIP. 196607291993031004

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2025 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Perbup Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

Tujuan yang harus dicapai dinas kelautan dan perikanan kabupaten rembang adalah “Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan

investasi terhadap ekonomi daerah” dengan indikator Presentase Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,5 %. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, telah secara resmi di rilis oleh BPS tercapai sebesar 7,29% atau realisasi kinerja tercapai sebesar 291,6%.

Sasaran strategis yang ditetapkan untuk renstra tahun 2021 – 2026 adalah “meningkatnya produksi perikanan” dengan indikator pertumbuhan produksi perikanan. Pertumbuhan produksi perikanan, pada tahun 2025 ini mencapai 1,05% dari target 1% sehingga diperoleh capaian 105%, keberhasilan ini didukung beberapa faktor antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM, Pemberdayaan pelaku utama kelautan dan perikanan;
2. Cuaca yang mendukung dan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terpenuhi, memungkinkan nelayan lebih sering melaut. Selama tahun 2025 suplai BBM bersubsidi lebih terjamin ketersediaannya sepanjang tahun sehingga nelayan dapat melakukan aktifitas penangkapan ikan secara konsisten tanpa harus terganggu ketersediaan BBM;
3. Adanya kebijakan dari Kementerian kelautan dan perikanan yang memantau jalur penangkapan ikan, mendukung kapal – kapal perikanan untuk tertib melakukan pendaratan di Pelabuhan pangkalan pendaratan dalam hal ini TPI di Kabupaten Rembang sehingga menurunkan unreported produksi hasil tangkapan/hasil tangkapan yang tidak dilaporkan atau tercatat.
4. Peningkatan permintaan produksi perikanan budidaya dan pengolahan mengalami peningkatan setelah adanya program MBG karena meningkatnya permintaan suplay ke SPPG di Kabupaten Rembang.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
I PENDAHULUAN	1
1.1. Cascading dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	2
1.2. Aspek Strategis Organisasi Perangkat Daerah	3
1.3. Dukungan Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan	4
1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	13
1.5. Dasar Hukum	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	20
2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan	21
2.3. Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.4. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	22
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025	30
3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya serta dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	36
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Nasional/Provinsi dan Kabupaten Sekitar	38
3.4. Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Terhadap Capaian sasaran Pemerintah Daerah	39
3.5. Realisasi Anggaran	40
3.6. Analisa Efisiensi Anggaran	43
3.7. Lintas Sektor	45
BAB IV PENUTUP	47
4.1. Kesimpulan	47
LAMPIRAN	50

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Rembang Berdasarkan tingkat Pendidikan 5

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan 7

Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan..... 8

Tabel 1.4 Sarana Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Rembang 9

Tabel 1.5 Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2024 dan Tahun 2025 12

Tabel 1.6 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas
Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 13

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat
Daerah Tahun Periode Rencana Strategis 20

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautaan dan Perikanan
Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026 21

Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 21

Tabel 2.4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Tahun 2025..... 23

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 26

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Tahun 2025 27

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 29

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Rembang Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 30

Tabel 3.3 Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan . 31

Tabel 3.4 Rumusan Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan 31

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
..... 32

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun
2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 36

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Nasional /Provinsi dan Kabupaten Sekitar 38

Tabel 3.8 Kontribusi Tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Terhadap Sasaran Pemda39

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 41

Tabel 3.10 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025 44

Tabel 3.11 Inventarisasi Lintas Sektor..... 46

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Cascading Kinerja Dinlutkan Kabupaten Rembang 2

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan 3

Gambar 2.1 Aplikasi SIPARI (Sistem Informasi Perikanan Rembang) 28

I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

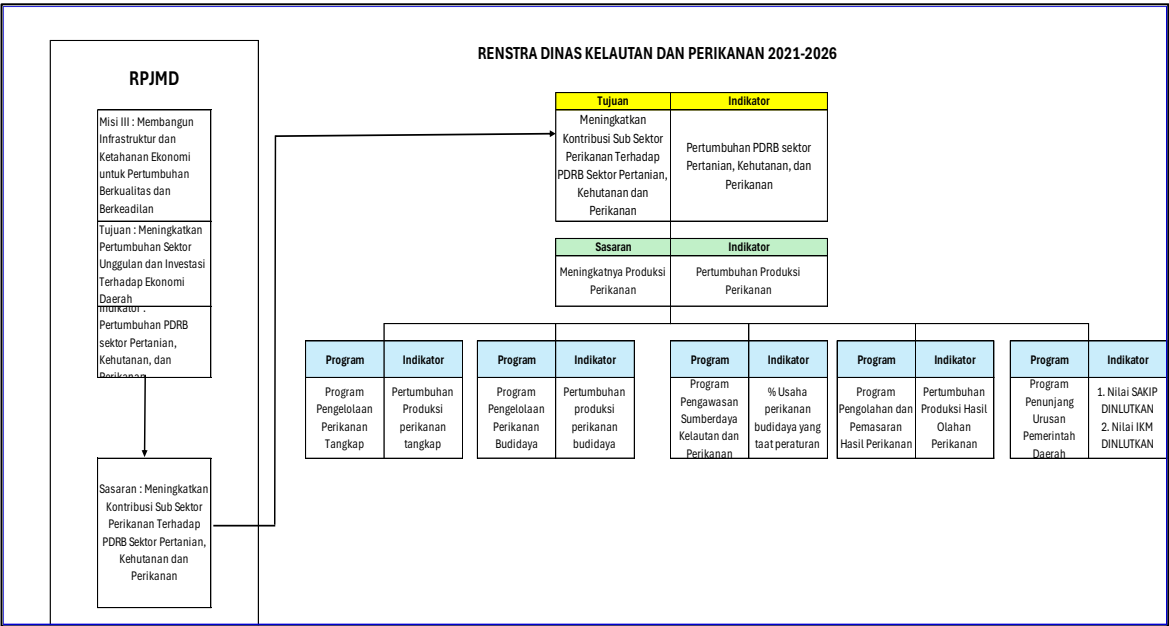
Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.1. Cascading dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Untuk pencapaian visi misi Kepala Daerah dalam RPJMD, Dinlutkan mendukung untuk Misi III : “Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”. Untuk mendukung hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar 1.1 Cascading Kinerja Dinlutkan Kabupaten Rembang



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Berikut bagan struktur organisasi Daerah Kabupaten Rembang.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021

1.2. Aspek Strategis Organisasi Perangkat Daerah

1.2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan yang diberikan mencakup beberapa aspek utama. Pertama, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yang meliputi pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya agar tetap berkelanjutan. Kedua, pelayanan kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan, seperti fasilitasi perizinan usaha perikanan, bantuan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan penyuluhan.

Selain itu, dinas juga berperan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap dan budidaya, termasuk peningkatan produksi, mutu hasil perikanan, serta penguatan daya saing produk. Pelayanan lainnya mencakup pengelolaan kawasan pesisir, konservasi sumber daya laut, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan laut.

Dari sisi administrasi, dinas menyediakan layanan perencanaan program, pengelolaan data dan informasi kelautan dan

perikanan, serta pelayanan rekomendasi teknis yang dibutuhkan masyarakat atau pelaku usaha. Dinas juga melakukan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang terintegrasi.

Secara umum, seluruh pelayanan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, dan pembudidaya ikan serta pengolah dan pemasar, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang.

1.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan tugas dan fungsi utama, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam penentuan isu strategis ini juga mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengelola potensi kelautan dan perikanan yang ada. Pada tahun 2025, isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dirumuskan di bawah ini :

1. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya yang cenderung menurun;
2. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap;
3. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah pengolahan hasil perikanan.

1.3. Dukungan Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan

1.3.1 Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang didukung dengan sumber daya yang meliputi SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur serta sarana dan prasarana.

Sumber daya manusia aparatur yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, baik yang berstatus PNS maupun PPPK, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel – tabel berikut ini. Sumberdaya manusia ini dibagi berdasarkan jabatan, golongan dan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh masing-masing pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	S2	1	1	0	0	2
2	S1 / D4	11	7	19	13	50
3	D3	2	0	4	0	6
4	SMA	7	1	72	20	100
5	SMP	0	0	0	0	0
6	SD	0	0	16	3	19
Jumlah		21	9	111	36	177

Sumber : Data Kepegawaian Dinlutkan Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.1 data kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan, jumlah aparatur sipil negara (ASN) tercatat sebanyak 177 orang, yang terdiri atas 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 147 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur kepegawaian didominasi oleh PPPK dengan proporsi sekitar 83 persen, sedangkan PNS hanya sekitar 17 persen.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, sebagian besar ASN masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah, yaitu SMA/ sederajat sebanyak 100 orang (±56 persen). Selanjutnya, ASN dengan kualifikasi S1/D4 berjumlah 50 orang (±28 persen), diikuti oleh D3 sebanyak 6 orang (±3 persen), serta S2 sebanyak 2 orang (±1 persen). Adapun ASN dengan pendidikan dasar (SD/ sederajat) masih tercatat sebanyak 19 orang (±11 persen). Komposisi ini mengindikasikan bahwa proporsi ASN dengan kualifikasi pendidikan tinggi (S1 ke atas) masih relatif terbatas, yaitu sekitar 29 persen dari total pegawai.

Dari aspek jenis kelamin, komposisi ASN didominasi oleh laki-laki sebanyak 132 orang (±75 persen), sedangkan perempuan berjumlah 45 orang (±25 persen). Kondisi ini menunjukkan adanya

ketimpangan gender yang masih cukup signifikan dalam struktur kepegawaian.

Secara umum, kondisi SDM pada Dinas Kelautan dan Perikanan telah mencukupi secara kuantitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, khususnya dalam kegiatan operasional teknis. Namun demikian, dari sisi kualitas dan komposisi, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian.

ASN dengan tingkat pendidikan menengah menunjukkan bahwa kapasitas SDM dalam mendukung fungsi perencanaan, analisis kebijakan, serta penguasaan teknologi masih perlu ditingkatkan. Kedua, proporsi PNS yang relatif kecil berpotensi memengaruhi keberlanjutan pelaksanaan fungsi manajerial dan kelembagaan, mengingat peran strategis PNS dalam pengambilan kebijakan dan penguatan tata kelola organisasi. Ketiga, masih terbatasnya jumlah ASN dengan kualifikasi pendidikan pascasarjana (S2) menjadi kendala dalam pengembangan inovasi, penelitian, dan perumusan kebijakan berbasis evidensi.

Dari segi gender, ASN Dinas Kelautan dan Perikanan didominasi oleh laki-laki, ini erat kaitannya dengan beban pekerjaan di lapangan antara lain tempat pelelangan ikan, Balai Benih Ikan dengan pekerjaan teknis BBI dan tenaga operasional pengelolaan TPI.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dalam pengembangan SDM, antara lain melalui peningkatan kualifikasi pendidikan ASN, baik melalui program tugas belajar maupun izin belajar, penataan komposisi kepegawaian yang lebih proporsional antara PNS dan PPPK, serta penguatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial. Selain itu, perlu didorong kebijakan afirmatif dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan guna mewujudkan keseimbangan gender.

Dengan upaya tersebut, diharapkan kualitas SDM Dinas Kelautan dan Perikanan dapat semakin meningkat sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Golongan I	16	3	19
2	Golongan II	2	0	2
3	Golongan III	16	8	24
4	Golongan IV	3	1	4
5	Golongan V	72	20	92
6	Golongan VII	4	0	4
7	Golongan IX	19	13	32
Jumlah		132	45	177

Dari Tabel 1.2 dapat dijabarkan bahwa dari sisi distribusi golongan, terlihat bahwa Golongan V merupakan kelompok dengan jumlah pegawai paling dominan, yaitu 92 orang (51,69%) dari total SDM. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada level jabatan menengah, yang biasanya mencerminkan tenaga teknis operasional dan pelaksana utama kegiatan. Dominasi ini dapat menjadi kekuatan dalam pelaksanaan program, namun juga perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas agar produktivitas tetap optimal.

Selanjutnya, Golongan IX menempati posisi kedua dengan 33 orang (18,54%), diikuti oleh Golongan III sebanyak 24 orang (13,48%) dan Golongan I sebanyak 19 orang (10,67%). Keberadaan pegawai pada golongan yang lebih tinggi seperti Golongan IX mengindikasikan adanya SDM dengan kompetensi dan pengalaman yang lebih tinggi, yang berperan penting dalam fungsi perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan.

Sementara itu, jumlah pegawai pada Golongan II, IV, dan VII relatif sangat kecil, masing-masing hanya 2 orang (1,12%), 4 orang (2,25%), dan 4 orang (2,25%).

Secara umum, struktur SDM berdasarkan golongan menunjukkan bahwa organisasi memiliki basis tenaga pelaksana operasional yang kuat, namun masih perlu penataan lebih lanjut pada aspek pemerataan golongan, penguatan jenjang karier, serta peningkatan keseimbangan gender. Upaya ini penting untuk mendukung efektivitas organisasi dalam jangka panjang serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kelautan dan

perikanan.

Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	ASN
			L	P		
1	2	3	4	5	6	6
1	Struktural					
	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	14	L		1	PNS
	Sekretaris	12		P	1	PNS
	Kasubbag Program dan Keuangan	9		P	1	PNS
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	8	L		1	PNS
	Kepala Bidang Kenelayanan	11	L		1	PNS
	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	11	L		1	PNS
	Kepala Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing	11	L		1	PNS
	Ka UPT Tempat Pelelangan Ikan	9	L		1	PNS
	KaSub Bag Tata Usaha	8	L		1	PNS
2	Fungsional					
	JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	8		P	1	PPPK
	JF Pengelola Kesehatan Ikan	9	L		1	PNS
	JF Pengelola Kesehatan Ikan	8	L		1	PPPK
	JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	8		P	1	PPPK
	JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8		P	2	PNS/PPPK
	JF Analis Pasar Hasil Perikanan	8		P	1	PPPK

Dari Tabel 1.3 dapat dijabarkan bahwa pada struktur jabatan tersebut terdapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, serta Kepala UPT yang secara keseluruhan didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PNS. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengambilan keputusan strategis dan pengendalian organisasi telah didukung oleh personel yang memiliki kewenangan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, jabatan fungsional diisi oleh ASN dengan kompetensi teknis sesuai bidang kelautan dan perikanan, antara lain jabatan pengelola produksi perikanan tangkap, pengelola kesehatan ikan, dan jabatan teknis lainnya yang mendukung pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan program pembangunan sektor

kelautan dan perikanan. Keberadaan jabatan fungsional menjadi elemen penting dalam meningkatkan profesionalisme, efektivitas pelayanan, dan pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Ditinjau dari aspek gender, komposisi pegawai menunjukkan keterlibatan pegawai laki-laki dan perempuan pada beberapa posisi jabatan, baik struktural maupun fungsional. Namun demikian, jabatan strategis masih didominasi oleh pegawai laki-laki sehingga perlu didorong penguatan pengarusutamaan gender dalam pengembangan karier dan penempatan pegawai secara proporsional sesuai kompetensi.

Secara umum, susunan jabatan yang tersedia telah mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Akan tetapi, optimalisasi kapasitas SDM masih perlu dilakukan melalui penguatan kompetensi teknis, peningkatan profesionalisme jabatan fungsional, serta penataan kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah pada sektor kelautan dan perikanan.

1.3.2 Data Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran sesuai target kinerja pelayanan yang ditetapkan, Dinas Kelautan dan Perikanan didukung dengan sarana dan prasarana aset pemerintah daerah. Kondisi aset yang dimiliki sebagian ada yang dalam kondisi rusak dan rusak berat. Sebagian aset ada yang tidak digunakan karena memerlukan biaya operasional yang besar. Sarana dan Prasarana yang dimiliki dinas kelautan dan perikanan sebagai pendukung kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.4 Sarana Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

No	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Kondisi				Nilai Aset (Rp)*
			Baik	Rusak			
				R	RS	RB	
1	2	3	3	4	5	6	7
3.1	Tanah	14	14				13.428.428.000
1.3.1.001	Tanah	14	14				13.428.428.000
3.2	Peralatan dan Mesin	1.175	1.166	9			6.990.021.173
1.3.2.001	Alat Besar	27	26	1			1.335.707.900
1.3.2.002	Alat Angkutan	72	70	2			2.530.282.338
1.3.2.003	Alat Bengkel dan Alat Ukur	46	46				168.628.250

No	Klasifikasi	Jumlah Barang (unit)	Kondisi				Nilai Aset (Rp)*
			Baik	Rusak			
				R	RS	RB	
1.3.2.004	Alat Pertanian	9	9				106.578.175
1.3.2.005	Alat Kantor dan Rumah Tangga	825	824	1			1.682.566.652
1.3.2.006	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	43	43				170.573.632
1.3.2.007	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2	2				5.128.000
1.3.2.008	Alat Laboratorium	16	16				207.925.250
1.3.2.010	Komputer	132	127	5			644.259.976
1.3.2.017	Peralatan Proses/Produksi	1	1				9.000.000
1.3.2.018	Rambu-Rambu	1	1				124.371.000
1.3.2.019	Peralatan Olahraga	1	1				5.000.000
3.3	Gedung dan Bangunan	76	69	7			32.964.284.112
1.3.3.001	Bangunan Gedung	76	69	7			32.964.284.112
3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	20	15	5	0	0	35.772.786.578
1.3.4.002	Bangunan Air	18	14	4			35.530.016.578
1.3.4.004	Jaringan	2	1	1			242.770.000
3.5	Aset Tetap Lainnya	2.147	2145	2			60.235.439
1.3.5.001	Bahan Perpustakaan	5	4	1			4.611.500
1.3.5.002	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2	2				6.200.000
1.3.5.004	Biota Perairan	2.140	2139	1			49.423.939
Jumlah		3.432	3.409	23	0	0	89.215.755.302

Sumber: Simda BMD Dinlutkan Rembang, 2025

Pada tabel 1.4 di atas dapat dilihat jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang (sampai dengan tahun 2025).

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 5 unit kendaraan roda empat. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif belum memadai karena hanya tersedia meliputi ruang rapat, mushola dan gedung utama, toilet dan belum tersedia ruang arsip, perpustakaan, ruang gudang, ruang tunggu dan ruang laktasi yang memadai. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia akan tetapi belum maksimal karena banyak yang dalam kondisi rusak berat. Personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai masih kurang memadai karena banyak unit dalam kondisi rusak berat.

1.3.3 Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025 memiliki anggaran belanja sebesar Rp 8.096.683.671,40 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 7.997.683.671,40 dan belanja modal sebesar Rp 99.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5 Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
4			PENDAPATAN DAERAH	12.630.000.000,00	12.630.000.000,00	-	9.920.000.000,00	8.000.000.000,00	- 1.920.000.000,00
4	1	02	Retribusi Daerah	12.630.000.000,00	12.630.000.000,00	-	9.920.000.000,00	8.000.000.000,00	- 1.920.000.000,00
			Jumlah Pendapatan	12.630.000.000,00	12.630.000.000,00	-	9.920.000.000,00	8.000.000.000,00	- 1.920.000.000,00
5			BELANJA DAERAH	12.291.064.000,00	11.865.406.130,00	- 425.657.870,00	7.834.338.554,00	8.096.683.671,40	262.345.117,40
5	1		BELANJA OPERASI	12.067.064.000,00	11.633.406.130,00	- 433.657.870,00	7.638.038.554,00	7.997.683.671,40	359.645.117,40
5	1	01	Belanja Pegawai	3.935.519.000,00	3.770.828.830,00	- 164.690.170,00	3.017.388.428,00	3.542.029.777,40	524.641.349,40
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.931.545.000,00	5.162.577.300,00	1.231.032.300,00	2.775.650.126,00	3.401.372.894,00	625.722.768,00
5	1	05	Belanja Hibah	4.200.000.000,00	2.700.000.000,00	- 1.500.000.000,00	1.845.000.000,00	1.054.281.000,00	- 790.719.000,00
5	2		BELANJA MODAL	224.000.000,00	232.000.000,00	8.000.000,00	196.300.000,00	99.000.000,00	- 97.300.000,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00	43.300.000,00	99.000.000,00	55.700.000,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.000.000,00	219.000.000,00	-	153.000.000,00	-	- 153.000.000,00
			Jumlah Belanja	12.291.064.000,00	11.865.406.130,00	- 425.657.870,00	7.834.338.554,00	8.096.683.671,40	262.345.117,40
			Total Surplus/(Defisit)	338.936.000,00	764.593.870,00	425.657.870,00	2.085.661.446,00	- 6.683.671,40	- 2.182.345.117,40
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
			Pembiayaan Neto	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 1.5 pada Tahun 2024, anggaran pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar Rp12.630.000.000,00. Sementara itu, pada sisi belanja daerah terjadi penurunan dari Rp12.291.064.000,00 menjadi Rp11.865.406.130,00 atau berkurang sebesar Rp425.657.870,00.

Pada Tahun 2025, pendapatan daerah mengalami penurunan cukup signifikan dari Rp9.920.000.000,00 menjadi Rp8.000.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp1.920.000.000,00. Anggaran belanja daerah perubahan Tahun 2025 mengalami kenaikan dari Rp7.834.338.554,00 menjadi Rp8.096.683.671,40 atau bertambah sebesar Rp262.345.117,40.

1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 1.6 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Kinerja				
a	Mengusulkan kepada Bagian Organisasi perihal penerbitan Pedoman Teknis /Surat Edaran terkait Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja PD dan Monitoring Tindak Lanjut Renaksi,	Komunikasi dan kolaborasi dengan Bagian Organisasi akan ditingkatkan untuk memastikan penerapan hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang lebih efektif dan penerbitan pedoman teknis penyusunan dokumen Rencana Aksi. Telah Membuat Surat Permohonan Penerbitan Pedoman Teknis kepada Bagian Organisasi.	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCvyKRX_4fyTKcLeBX0e
b	Segera menyampaikan dan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja Tahun 2024 dan 2025 secara lengkap	Telah menyampaikan dokumen perencanaan kinerja	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCvyKRX_4fyTKcLeBX0e
-	Pedoman Teknis perencanaan kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 000.8/0032/2024 tanggal 5 Januari 2024	Telah dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perubahan	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCvyKRX_4fyTKcLeBX0e
-	Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Rncana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 yang telah disahkan	Telah mengunggah Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Rncana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 yang telah disahkan	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCvyKRX_4fyTKcLeBX0e

No	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
-	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Yang Telah disahkan	Telah mengunggah Rencana Kinerja Perubahan Tahunan Tahun 2025 Yang Telah disahkan	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
c	Segera menyampaikan dan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tahunan 2024 dan 2025 pada halaman https://dinlutkan.rembangkab.go.id/yaitu :	Telah menyampaikan dan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tahunan 2024 dan 2025 pada halaman https://dinlutkan.rembangkab.go.id	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
-	Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan Tahun 2025	Telah melampirkan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan Tahun 2025	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
-	Perjanjian Kinerja seluruh pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2025	Telah melampirkan Perjanjian Kinerja seluruh pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2025	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
d	Terhadap ketidakselarasan agar:				
-	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun berikutnya menyampaikan perbandingan dan perubahan jumlah pegawai based – on Rencana Strateis (Renstra) Tahun 2021 – 2026	Telah menyampaikan perbandingan dan perubahan jumlah pegawai based – on Rencana Strateis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 Pada Tahun Berikutnya	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
-	Penyusunan indikator dan target Rencana Kerja (Renja) OPD periode berikutnya berpedoman pada rencana strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026	Telah melakukan penyusunan indikator dan target Rencana Kerja (Renja) OPD periode berikutnya berpedoman pada rencana strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
-	Penyusunan Indikator Kinerja pada cascading berpedoman Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026	Telah dilakukan penyesuaian Cascading Renstra 2021 - 2026	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
-	Penyusunan indikator kinerja pada sasaran kinerja pegawai (SKP) periode berikutnya berpedoman perjanjian kinerja (PK)	Penyesuaian SKP Pada Periode Tahun 2025 sesuai dengan PK dilakukan pada periode SKP final 2025	Selesai	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
-	Penyusunan Rencana Aksi periode berikutnya berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026	Telah Dilakukan penyusunan Renaksi yang sesuai dengan Dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
e	Memperbaiki cascading Dinas Kelautan dan Perikanan dengan menyajikan informasi terkait indikator kinerja sampai dengan indikator sub kegiatan beserta target kinerja sampai dengan indikator kegiatan sesuai dengan Dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 – 2026	Telah disusun Cascading Terbaru sesuai Renstra 2025 - 2029	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e

No	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
f	Memperbaiki pohon kinerja dinas kelautan dan perikanan dengan menyajikan rumusan dan indikator kinerja sampai dengan level output beserta crosscutting secara logis (penyusunan pohon kinerja belum mempedomani Permenpan Nomor 89 Tahun 2021)	Telah menyusun pohon kinerja dinas kelautan dan perikanan sesuai dengan renstra 2021 - 2026 (penyusunan pohon kinerja belum mempedomani Permenpan Nomor 89 Tahun 2021)	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
g	Memastikan kembali dalam penetapan indikator kinerja pada renstra dinas kelautan dan perikanan tahun 2025 – 2029 dan profil indikator kinerja setiap level kinerja (tujuan/sasaran/program/kegiatan) secara detail melalui deskripsi, formulasi perhitungan dan sumber data informasi yang lebih rinci agar memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Based)	Telah melakukan Penyusunan Profil Indikator Renstra 2025 - 2029	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
h	Pegawai / ASN Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun SKP (Rencana Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu) wajib mempedomani Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Renstra, Renja, DPA dan Perjanjian Kinerja) sehingga kinerja pegawai / individu akan mendukung kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan	Telah mensosialisasikan kepada Pegawai / ASN Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun SKP (Rencana Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu) wajib mempedomani Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Renstra, Renja, DPA dan Perjanjian Kinerja) sehingga kinerja pegawai / individu akan mendukung kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan mulai anggaran perubahan 2025	Selesai	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
i	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) agar berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) OPD	Telah dilakukan penyusunan RKAP 2025 yang didasarkan pada Renja Perubahan 2025	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
j	Memperbaiki Dokumen Renaksi Tahun 2025 dengan melengkapi format yang berisikan jadwal monitoring, indikator, target dan penanggungjawab sampai dengan sub kegiatan serta menyelaraskan dengan monitoring renaksi 2025 sampai triwulan II	Telah menyusun Dokumen Renaksi Tahun 2025 sesuai dengan format yang berisikan jadwal monitoring, indikator, target dan penanggungjawab sampai dengan sub kegiatan serta menyelaraskan dengan monitoring renaksi 2025 sampai triwulan II	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
2	Pengukuran Kinerja				
a	Segara Menyampaikan dokumen:		Selesai		
-	SOP pengumpulan data kinerja	Telah Menyusun SOP pengumpulan data kinerja	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV

No	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
					1Sg63oMCvyKRX_4fyTKcLeBX0e
-	Pemantauan atas capaian kinerja secara berjenjang pada aplikasi sapa kinerja	Telah mengisi dan melakukan pemantauan atas capaian kinerja secara berjenjang pada aplikasi sapa kinerja	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCvyKRX_4fyTKcLeBX0e
b	Memastikan data kinerja yang disajikan pada dokumen lkjip dinas kelautan dan perikanan tahun selanjutnya, dikuatkan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja sampai dengan indikator kegiatan sesuai dengan dokumen profil kinerja dinas kelautan dan perikanan sehingga dapat diyakini keakuratannya	Akan dilakukan penyusunan LKjIP Tahun 2025 dikuatkan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja sampai dengan indikator kegiatan sesuai dengan dokumen profil kinerja dinas kelautan dan perikanan sehingga dapat diyakini keakuratannya	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCvyKRX_4fyTKcLeBX0e
c	Masing – masing unit kerja yaitu sekretariat / bidang menyusun laporan kinerja triwulanan berdasarkan rencana aksi tahun 2025	Telah disusun laporan kinerja triwulan 4 berdasarkan rencana aksi tahun 2025	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCvyKRX_4fyTKcLeBX0e
3	Pelaporan Kinerja				-
a	Segera mempublikasikan laporan kinerja instansi pemerintah (LkjIP) tahun 2021 – 2024 yang telah disahkan pada website https://dinlutkan.rembangkab.go.id	Telah mempublikasikan laporan kinerja instansi pemerintah (LkjIP) tahun 2021 – 2024 yang telah disahkan pada website https://dinlutkan.rembangkab.go.id	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCvyKRX_4fyTKcLeBX0e
b	Memperbarui Bab III Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2024, yaitu:		Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCvyKRX_4fyTKcLeBX0e
-	Menampilkan analisis dan formulasi perhitungan kinerja sesuai profil indikator kinerja yang telah dibuat	telah membuat analisis dan formulasi perhitungan kinerja sesuai profil indikator kinerja yang telah dibuat	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCvyKRX_4fyTKcLeBX0e
-	Mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Telah menampilkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCvyKRX_4fyTKcLeBX0e
-	Menyampaikan hasil analisa kategori dan sumber data (Tabel III.6)	analisa kategori dan sumber data telah ditampilkan di Tabel III.6	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCvyKRX_4fyTKcLeBX0e
-	Menyajikan perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir jangka menengah (renstra 2021 – 2026) sampai dengan level sub kegiatan (Tabel III.5)	Telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir jngka menengah (renstra 2021 – 2026) sampai dengan level sub kegiatan (Tabel III.5)	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCvyKRX_4fyTKcLeBX0e

No	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
-	Menyajikan perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya sampai dengan level sub kegiatan (Tabel III.2)	Telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya sampai dengan level sub kegiatan (Tabel III.2)	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
-	Menyajikan perbandingan analisis dan evaluasi realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja di level nasional / provinsi / kabupaten lain	Telah menyajikan perbandingan analisis dan evaluasi realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja di level nasional / provinsi / kabupaten lain	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
-	Menyajikan analisis kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan /atau hambatannya	Telah menyajikan analisis kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan /atau hambatannya	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
-	Menyajikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sampai dengan level sub kegiatan (Tabel III.8), serta mempedomani formulasi perhitungannya yang terdapat pada peraturan bupati rembang nomor 30 tahun 2024 tentang pedoman pelaporan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah beserta analisa dan penjelasannya	Karena Kondisi kinerja tidak tercapai/minus maka tidak dapat dinilai adanya efisiensi	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
c	Segera menyampaikan surat keputusan tim penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LkjIP) Tahun 2024	Telah menyampaikan surat keputusan tim penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LkjIP) Tahun 2024	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
d	Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja, diharapkan setiap pejabat dan pegawai dinas kelautan dan perikanan paham, peduli serta komitmen melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap kinerjanya yang disajikan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan.	Telah dilakukan Sosialisasi sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja, diharapkan setiap pejabat dan pegawai dinas kelautan dan perikanan paham, peduli serta komitmen melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap kinerjanya yang disajikan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan.	Selesai		https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi				-
a	Segera menyampaikan dokumen LHE Penilaian Mandiri atas implementasi SAKIP Tahun 2021, 2022 dan 2023	Telah menyampaikan dokumen LHE Penilaian Mandiri atas implementasi SAKIP Tahun 2021, 2022 dan 2023	Selesai	Kasubbag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX_4fyTKcLeBX0e

No	Saran/ Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status TL	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6
b	Melaksanakan penilaian mandiri evaluasi implementasi sakis internal secara lebih mendalam dengan pimpinan dan tim asesor penilaian mandiri evaluasi implementasi sakis dinas kelautan dan perikanan, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat dan dapat ditindaklanjuti serta diimplementasikan secara optimal	Merencanakan untuk melaksanakan penilaian mandiri evaluasi implementasi sakis internal secara lebih mendalam dengan pimpinan dan tim asesor penilaian mandiri evaluasi implementasi sakis dinas kelautan dan perikanan, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat dan dapat ditindaklanjuti serta diimplementasikan secara optimal	Selesai	Kasubag Program dan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX4fyTKcLeBX0e
c	Membuat / mengembangkan inovasi dalam upaya mendorong percepatan pencapaian dan peningkatan kinerja perangkat daerah	Menggabungkan aplikasi SIPARI dan XTAR pertamina	Selesai	Bidang Bina Usaha dan Daya Saing	https://drive.google.com/drive/folders/1i1FShV1Sg63oMCyyKRX4fyTKcLeBX0e

1.5. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah

7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
9. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor: 000.8.6.3/5792/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, Monitoring Dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja, Dan Pelaporan Kinerja Dalam Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

Tujuan yang harus dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang adalah “Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah” dengan indikator Presentase Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,5 %. Adapun Sasaran strategis yang ditetapkan untuk renstra tahun 2021 – 2026 adalah “meningkatnya produksi perikanan” dengan indikator pertumbuhan produksi perikanan

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (Baseline 2021)	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	NA	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,7
	Meningkatkan Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	-2,07	1	1	1	1	1	1

Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026

2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tersaji pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautaan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	1	1	1	1	1	1

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan Dan Perikanan

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

NO.	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Produksi perikanan	1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	1	Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, melalui:
			a	pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap
			b	pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil
			c	pengembangan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
			d	Pengembangan kartu nelayan yang terintegrasi dengan sistem informasi database
		2. Penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapam teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif	2	Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kerjasama antar daerah dan lintas sektoral
			3	Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui:
			a	Peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB)
			b	Intensifikasi budidaya ikan air payau dan laut dan tawar
			c	pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal

NO.	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
			d	peningkatan sarana dan prasarana perbenihan
			e	penerapan dan pemanfaatan teknologi budidaya
			f	Pengembangan kawasan budidaya
			4	Pengembangan produk benih dan induk unggul tahan penyakit melalui:
			a	pemenuhan jaminan mutu, keamanan benih dan induk unggul dan induk ikan dan lingkungan budidaya yang kondusif
		3. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor	5	Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui :
			a	pemenuhan kebutuhan bahan baku;
			b	peningkatan konsumsi ikan
			c	peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien
			d	pemberian akses dan pembinaan untuk pencapaian Seritikat Kelayakan Pengolahan (SKP) atau sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikanyang Baik / GMP (<i>Good Manufacturing Practices</i>) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (<i>Standar Sanitation Operating Procedure (SSOP)</i>)
		4. Peningkatan produksi garam yang berkualitas, terintegrasi, dan berteknologi	6	Pengembangan usaha produksi garam melalui integrasi lahan, penerapan teknologi dan tata kelola logistik garam

2.4. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinlutkan Kabupaten Rembang tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Meningkatkaa Produksi Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA	4.514.338.553	5.801.862.003	1.287.523.450
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	5.000.000	- 5.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	-
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	-	- 5.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.098.868.428	3.635.149.777	536.281.349
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.017.388.428	3.542.029.777	524.641.349
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.480.000	93.120.000	11.640.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.480.000	2.480.000	-
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.480.000	2.480.000	-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	745.000	- 99.255.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	745.000	- 99.255.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.332.125	135.246.226	22.914.101
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.332.125	4.332.125	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	33.500.000	8.500.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.004.000	4.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	6.642.101	- 3.357.899
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	8.000.000	-
			Penyediaan Bahan/Material	-	13.538.000	13.538.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	44.230.000	4.230.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	10.000.000	10.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	10.000.000	10.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.125.833.000	1.898.426.000	772.593.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	6.540.000	1.540.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.780.000	127.780.000	- 2.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	991.053.000	1.764.106.000	773.053.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.825.000	114.815.000	49.990.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.550.000	55.460.000	14.910.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.750.000	28.740.000	14.990.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.525.000	30.615.000	20.090.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.320.000.001	1.714.821.668	- 605.178.333
			<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	1.210.000.000	664.281.000	- 545.719.000
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	15.000.000	15.000.000	-
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.195.000.000	649.281.000	- 545.719.000
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			-
			<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	325.000.000	270.000.000	- 55.000.000
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	270.000.000	250.000.000	- 20.000.000
			Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	55.000.000	20.000.000	- 35.000.000
			<i>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	785.000.001	780.540.668	- 4.459.333
			Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	26.650.000	100.000.000	73.350.000
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	758.350.001	680.540.668	- 77.809.333
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	620.000.000	510.000.000	- 110.000.000
			<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	118.000.000	145.000.000	27.000.000
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	100.000.000	135.000.000	35.000.000
			Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	18.000.000	10.000.000	- 8.000.000
			<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	502.000.000	365.000.000	- 137.000.000
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	10.000.000	- 2.000.000
			Penjaminan Ketersedian Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	490.000.000	355.000.000	- 135.000.000
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	380.000.000	70.000.000	- 310.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	200.000.000	-	- 200.000.000
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	200.000.000	-	- 200.000.000
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	180.000.000	70.000.000	- 110.000.000
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	35.000.000	35.000.000	-
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	145.000.000	35.000.000	110.000.000
Total Anggaran yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2025				7.834.338.554	8.096.683.671	262.345.117

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinlutkan Tahun 2025

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tujuan		
	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,5%
2.	Sasaran		
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan	1%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat daerah	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.514.338.553
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.320.000.001
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	620.000.000
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	380.000.000
Jumlah Anggaran		7.834.338.554

Sumber : DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinlutkan melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkanya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tujuan :			
1.1	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	2,5
2	Sasaran :			
2.1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	1

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinlutkan Tahun 2025

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat daerah	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.801.862.003,40
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.714.821.668,00
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	510.000.000,00
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	70.000.000,00
Jumlah Anggaran		8.096.683.671,40

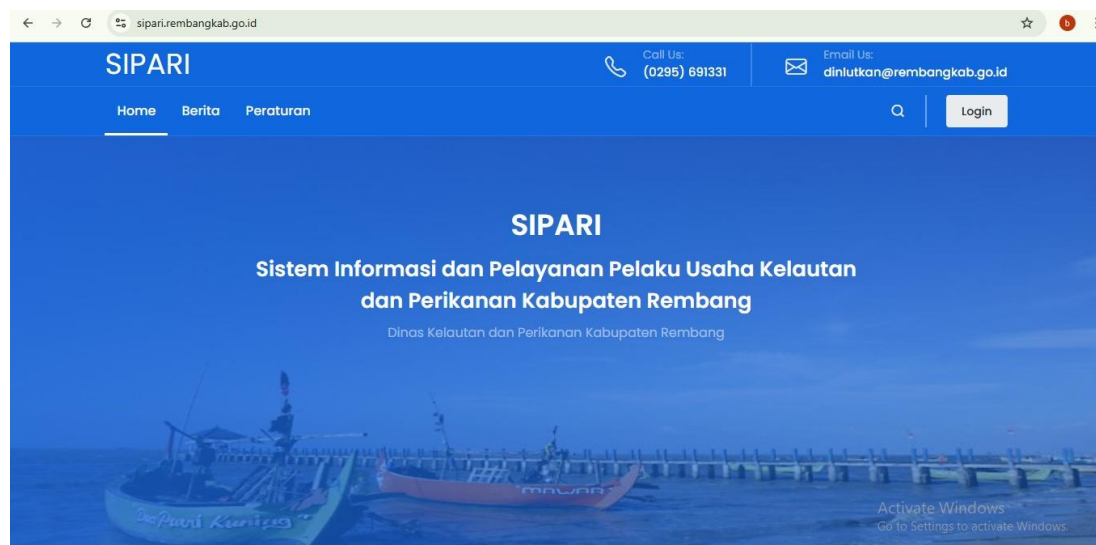
Sumber : DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Aplikasi SIPARI (Sistem Informasi Perikanan Rembang)

Aplikasi **SIPARI (Sistem Informasi Perikanan Rembang)** adalah layanan digital dari Pemerintah Kabupaten Rembang yang dikembangkan sejak 2022 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Dinas Kominfo. Aplikasi ini berfungsi mempermudah nelayan dan pengusaha perikanan dalam mendapatkan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) secara transparan.

Gambar 2.1 Aplikasi SIPARI (Sistem Informasi Perikanan Rembang)



2. Website Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Selain berfungsi sebagai media keterbukaan informasi publik, website Dinlutkan juga berfungsi sebagai wahana menampung aspirasi atau masukan dari masyarakat.

3. Instagram Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Untuk keperluan peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik, Dinlutkan juga memanfaatkan *platform* Instagram pada akun @dinlutkanrembang. Media sosial ini merupakan ajang komunikasi publik dan pelayanan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan Dinlutkan serta informasi-informasi umum lainnya.

4. Tiktok Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Untuk keperluan peningkatan keterbukaan informasi publik dan pelayanan utamanya kepada pelaku usaha budidaya perikanan, Dinlutkan juga memanfaatkan *platform tiktok* pada akun @bbi.pamotan.rbg. Media sosial ini merupakan ajang komunikasi publik dan pelayanan informasi mengenai Balai Benih Ikan Pamotan dan informasi terkait lain.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator / meta data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kriteria / Kode	Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026	Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	1	1,05	105	Sangat Tinggi	1	105
		Metadata Indikator : Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan tahun (n)/3							

Sumber : Laporan Capaian Dinas Kelautan dan Perikanan TW I- IV Tahun 2025

3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	{Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (n) – Produksi perikanan (n-1)/ Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (n-1)} x 100%

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tujuan = Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang adalah meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap perekonomian daerah, yang diukur melalui pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang Tahun 2025, pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tercapai sebesar 7,29%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,5%, sehingga capaian kinerja sebesar 291,6 % menunjukkan hasil yang sangat baik.

3.1.2 Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan

Kinerja sasaran meningkatkan Produksi Perikanan dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Rumusan Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan tahun (n)/3

Berdasarkan tabel sasaran dan indikator kinerja tersebut, sasaran “Meningkatkan Produksi Perikanan” diukur melalui indikator “Pertumbuhan Produksi Perikanan” dengan meta indikator berupa

persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan dari tahun sebelumnya (n) dibandingkan tahun dasar atau tahun sebelumnya (n-1). Indikator ini menunjukkan kemampuan sektor perikanan dalam meningkatkan volume produksi secara berkelanjutan sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.

Analisis Ketercapaian Sasaran : meningkatnya produksi perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 1,05% dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 105% (terlampau).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar -9,28%, terdapat kenaikan sebesar 10,33%.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2026 adalah 105%

Keberhasilan capaian Sasaran, dengan Indikator Pertumbuhan Produksi Perikanan tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM OPD DINLUTKAN	Skor	83,69	90,91	108,63
		Nilai SAKIP OPD DINLUTKAN	Skor	72,72	0	0,00
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	95	95	100,00
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	95	95	100,00
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34	34	100,00
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00
8	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	95	95	100,00
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	100,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	100	100	100,00
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200	200	100,00
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	%	100	100	100,00
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100,00
18	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%	95	95	100,00
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	100,00
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100,00
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BDM Dengan Kondisi Baik	%	95	95	100,00
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	73	69	94,52
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	100,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	100,00
30	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	28,5	19,36	67,93
31	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	% Sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam kondisi baik	%	25	25	100,00
32	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	5	0	0,00
33	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	25	25	100,00
34	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pertumbuhan Kelas Kelompok Nelayan	%	3	3	100,00
35	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	50	150	300,00
36	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	50	20	40,00
37	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Kenaikan Nilai raman (Rp)	%	0,5	76,06	15.212,00
38	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	3	3	100,00
39	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	2	2	100,00
40	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	%	1,25	1,28	102,40
41	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	% Kenaikan Kelas Pokdakan, Kugar	%	1,25	1,8	144,00
42	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	10	70	700,00
43	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	18	65	361,11
44	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	% prasarana pembudidayaan ikan dan garam dalam kondisi baik	%	35	35	100,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Th. 2025	Realisasi Th. 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
45	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	6	8	133,33
46	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	6	6	100,00
47	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Perikanan	%	1,25	3,37	269,60
48	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk pengolahan perikanan yang bersertifikat	Unit			#DIV/0!
49	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	50	53	106,00
50	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	47,49	54,77	115,33
51	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	49,81	54,77	109,96
52	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	7	30	428,57	

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya serta dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang selama periode Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2022			2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	1	-4,97	-497	1	-3,49	-349	1,00	-9,28	-928	1	1,05	105

Sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Adalah “Meningkatnya Produksi Perikanan”, realisasi dari tahun 2022 sampai dengan 2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pertumbuhan produksi perikanan mengalami penurunan sejak tahun 2021 sampai dengan 2024. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan dukungan fungsi lingkungan terhadap ekosistem laut, terjadinya wabah penyakit di bidang budidaya, terjadinya penurunan permintaan ekspor terhadap produk olahan perikanan dan kondisi cuaca yang kurang mendukung.

Pada Tahun 2022 realisasi pertumbuhan produksi perikanan tercatat sebesar -4,97% dari target 1%, sehingga capaian kinerja berada pada angka -497%. Pada Tahun 2023, realisasi pertumbuhan produksi perikanan masih mengalami kontraksi sebesar -3,49% dengan target tetap 1%, sehingga capaian kinerja mencapai -349%. Selanjutnya pada Tahun 2024, realisasi kembali mengalami penurunan cukup tajam menjadi -9,28% dari target 1%, dengan capaian kinerja sebesar -928%.

Namun pada tahun 2025 terjadi kenaikan yang cukup signifikan, realisasi pertumbuhan produksi perikanan tahun 2025 sebesar 1,05% telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 105% . Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi kinerja tahun 2025 naik sebesar 10,33%.

Setelah penerapan Permen KP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Permen KP Nomor 11 Tahun 2023. Dengan pelaksanaan Permen KP tersebut mulai diterapkan pengaturan penangkapan ikan yang terkendali berdasarkan kuota dan zona serta penertiban bongkar muat hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sehingga mencegah hilangnya data statistik perikanan tangkap.

Pencapaian keberhasilan tersebut didukung juga oleh upaya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan kualitas SDM, penerapan teknologi budidaya/tangkap yang efisien, ketersediaan sarana prasarana, serta dukungan kebijakan dan permodalan serta peningkatan diversifikasi produk olahan perikanan.

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Nasional/Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja pusat/provinsi dan kabupaten daerah sekitar diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Nasional /Provinsi dan Kabupaten Sekitar

No	Indikator	Realisasi Th. 2025	Realisasi Provinsi Th. 2025	Realisasi Nasional Th. 2025	Realisasi Daerah Sekitar		
					Jepara	Pati	Demak
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertumbuhan Produksi Perikanan	1.05%	2,96%	3,80%	3,12%	-16,43%	1,14%

Berdasarkan tabel perbandingan kinerja indikator pertumbuhan produksi perikanan Tahun 2025, Kabupaten Rembang memperoleh realisasi sebesar 1,05%. Capaian tersebut masih berada di bawah realisasi tingkat Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,96% maupun nasional sebesar 3,80%. Pertumbuhan Produksi perikanan di Jawa Tengah didukung dengan pertumbuhan produksi sektor budidaya yang mengalami kenaikan signifikan pada Tahun 2025, sedangkan di Kabupaten Rembang sektor budidaya perikanan belum menjadi pengampu utama produksi perikanan.

Jika dibandingkan dengan daerah sekitar, capaian Kabupaten Rembang juga masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Jepara yang mencapai 3,12%. Produksi perikanan Kabupaten Jepara didukung oleh kenaikan produksi perikanan budidaya yang potensinya besar, produksi perikanan Kabupaten Rembang sedikit lebih rendah dibandingkan Kabupaten Demak sebesar 1,14%. Namun demikian, capaian Kabupaten Rembang masih lebih baik dibandingkan Kabupaten Pati yang mengalami penurunan produksi perikanan sebesar -16,43%.

Belum optimalnya pertumbuhan produksi perikanan di Kabupaten Rembang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya belum optimalnya pengelolaan potensi budidaya perikanan di Kabupaten Rembang, kondisi cuaca dan musim penangkapan ikan serta keterbatasan sarana dan prasarana perikanan.

3.4. Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Terhadap Capaian sasaran Pemerintah Daerah

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8 Kontribusi Tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Terhadap Sasaran Pemda

No	Sasaran Pemda	Indikator Pemda	Target	Realisasi	Tujuan / sasaran Perangkat daerah	Indikator	Target Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi Terhadap Ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,5%	7,29%	Meningkatkan Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan	1%	1,05%

Sasaran Pemerintah Daerah yaitu “meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah” dengan indikator Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang ditargetkan sebesar 2,5%, namun realisasinya mencapai 7,29%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mampu tumbuh melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejalan dengan sasaran perangkat daerah, yaitu meningkatkan produksi perikanan, indikator Pertumbuhan Produksi Perikanan juga menunjukkan kinerja yang baik. Dari target sebesar 1%, realisasi yang dicapai sebesar 1,05% atau melampaui target sebesar 105% dari target yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan produksi perikanan berjalan efektif serta mampu mendukung peningkatan kinerja sektor perikanan secara keseluruhan.

Keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya aktivitas produksi perikanan, dukungan sarana dan prasarana perikanan, optimalisasi pembinaan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan, serta kondisi produksi yang relatif stabil selama tahun 2025. Selain itu, sinergi program pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat pelaku usaha perikanan turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi dan pertumbuhan sektor perikanan.

3.5. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Sub Bab ini menyajikan besarnya anggaran dan realisasi Belanja yang mendukung Sasaran tahun n secara langsung. Realisasi kinerja dan anggaran tahun 2025 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan	1%	1,05%	105%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.801.862.003,40	5.608.186.939,00	96,66
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.714.821.668,00	1.398.443.426,00	81,55
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	510.000.000,00	492.613.678,00	96,59
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	70.000.000,00	69.960.880,00	99,94
Jumlah							8.096.683.671,40	7.569.204.923,00	93,49

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki sasaran “*Meningkatkan Produksi Perikanan*”, dengan indikator “pertumbuhan produksi perikanan” menunjukkan hasil yang sangat baik. Target pertumbuhan produksi perikanan tahun 2025 ditetapkan sebesar 1% dengan realisasi mencapai 1,05%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 105%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendorong peningkatan produksi perikanan secara signifikan melampaui target yang telah ditetapkan.

Tahun 2025 Penyerapan anggaran belanja sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 7.569.204.923,- dari total anggaran sebesar Rp. 8.096.683.671,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 93,49%. Sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2024 penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.326.057.971,- atau sebesar 95,45% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 11.865.286.252.372,- Realisasi anggaran tersebut di dalamnya sudah termasuk realisasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Kalau dibandingkan perubahan anggaran pada tahun 2024 dengan perubahan anggaran pada tahun 2025, jumlah anggaran lebih besar pada tahun 2024.

Anggaran belanja Operasi tahun 2025 sebesar Rp. 7.997.683.671,4,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.474.699.523,-. Prosentase realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar 93,46 %. Anggaran belanja modal sebesar Rp. 99.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 94.505.400,- atau sebesar 95,46%.

Dari 4 program yang dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang capaian realisasi anggaran sebesar 93,49%. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp. 2.320.000.001,- realisasi sebesar 1.714.821.668,- atau 73,91%. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar Rp. 510.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 492.613.678,- atau sebesar 96,59,47%. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.960.880,- atau 99,94%. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran

sebesar Rp. 5.801.862.003,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.608.186.939,- atau 96,66%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sektor perikanan berjalan efektif, baik dari sisi pencapaian indikator kinerja maupun penyerapan anggaran. Keberhasilan tersebut menjadi indikator positif bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan mampu mendorong pertumbuhan produksi perikanan daerah secara optimal.

3.6. Analisa Efisiensi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai tingkat optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara tingkat capaian kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran yang digunakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Berikut rumusan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

$$Capaian Realisasi Anggaran = \frac{Realisasi Anggaran}{Target Anggaran} \times 100 \%$$

$$Capaian Kinerja = 100\% - \frac{Realisasi Anggaran}{Target Anggaran} \times 100\%$$

$$Efisiensi = 100\% - \frac{Capaian Realisasi Anggaran (\%)}{Capaian Kinerja (\%)} \times 100\%$$

$$Capaian Kinerja = 100\% - \frac{Realisasi Kinerja}{Target Kinerja} \times 100\%$$

$$Capaian Kinerja = 100\% - \frac{Realisasi Kinerja}{Target Kinerja} \times 100\%$$

$$Rumus Rasio Efisiensi = 100\% - \frac{Capaian Realisasi Anggaran (\%)}{Capaian Kinerja (\%)} \times 100\%$$

Keterangan :

Angka Positif = Efisien

Angka Negatif = Tidak efisien

Berikut Adalah penyajian rasio efisiensi atas penggunaan sumber daya pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 :

Tabel 3.10 Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target / Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan	1%	1,05%	105%	8.096.683.671,40	7.569.204.923,00	93,49	527.478.748,40

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan tingkat capaian kinerja yang dihasilkan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan persentase realisasi anggaran terhadap persentase capaian indikator kinerja.

Analisis efisiensi dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%;
2. Tidak Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase 100%;
3. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran meningkatnya produksi perikanan sangat baik 1,05% dari target sebesar 1% dengan penyerapan anggaran sebesar 93,49%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi dan juga ada efisiensi sebesar 6,51%.

3.7. Lintas Sektor

Untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan baik dari sisi internal Pemerintah Daerah sendiri maupun pihak-pihak dari luar sebagai pemangku kepentingan (Stakeholders), kolaborasi tersebut antara lain:

Tabel 3.11 Inventarisasi Lintas Sektor

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok sasaran		Manfaat Bagi PD / Klp Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penjaminan Ketersediaan BBM Bersubsidi Untuk Pelaku Utama	OPD, Pertamina, KUD Mina	Pemegang Kebijakan Kuota BBM Bersubsidi	Kouta BBM	3443 Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan skala mikro kecil	Menjamin Ketersediaan BBM Bersubsidi
2	Hilirisasi Pangan	OPD, Bank Indonesia, Pengolah dan Pemasar	Fasilitasi Hilirisasi Pangan	Peningkatan Daya Saing Produk Olahan	Pengolah dan Pemasar Produk Pengolahan Perikanan	Meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan keberlanjutan usaha
3	Kolaborasi Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan	OPD, KKP (penyuluh), Pelaku Utama	Peningkatan Kelas Kelompok, Pembinaan Pelaku Utama	Peningkatan Kapasitas SDM	Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan skala mikro kecil	Meningkatkan Akses Peningkatan Kapasitas SDM, Akses Permodalan, Peningkatan Kelas Kelompok
4	KUD Mina	OPD, KUD Mina, Nelayan	Mendorong nelayan dan bakul untuk proses lelang di TPI, ikut menjaga ketertiban, kemandirian, kebersihan di TPI membantu pembinaan dan pemantauan terhadap ketertiban pembayaran bakul	Meningkatnya pelayanan di TPI, meningkatnya PAD	Paguyuban nelayan, paguyuban bakul	membantu kelancaran pelayanan di TPI terutama kedisiplinan bakul dalam pembayaran lelang

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 1 sasaran strategis yaitu meningkatnya produksi perikanan sebesar 1%. Sasaran strategis tersebut tercapai sebesar 1,05% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 105%.
2. Persentase efektivitas kinerja indikator sasaran Tahun 2025 sebesar 105% dan persentase efisiensi kinerja tahun 2025 sebesar 6,51%.
3. Faktor pendukung keberhasilan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:
 - a. Dukungan sarana dan prasarana perikanan melalui pemberian fasilitasi atau hibah uang dan barang;
 - b. Optimalisasi pembinaan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan;
 - c. kondisi produksi yang relatif stabil selama tahun 2025
 - d. Selain itu, sinergi program pemerintah daerah dan pusat dalam penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur mendorong tertibnya pencatatan dan kelestarian lingkungan perairan

4. Langkah Perbaikan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pemberdayaan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk nelayan kecil, pembudidaya skala mikro dan kecil, serta pengolah dan pemasar skala mikro dan kecil;
2. Memfasilitasi masyarakat akan mahalnya harga BBM telah ditanggapi dengan pelayanan pemberian rekomendasi BBM bersubsidi untuk pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil.
3. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kapasitas nelayan, pembudidaya dan pengolah serta pemasar melalui kegiatan pembinaan rutin sinergi dengan penyuluh perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
4. Pendampingan rutin kepada pelaku utama kelautan dan perikanan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk pengembangan usahanya;
5. Pendampingan terhadap akses permodalan bersinergi dengan pendamping LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Pendampingan dan pemantauan kesehatan lingkungan dan benih budidaya untuk mencegah penyakit ikan dan kegagalan budidaya bersinergi dengan BKIPM (Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan) Semarang serta Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BLPKIL) dan dan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
7. Fasilitasi untuk memperoleh akses sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) untuk pembudidaya ikan sehingga bisa meminimalisir kegagalan budidaya.
8. Pemberian akses dan pembinaan untuk pencapaian Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) atau sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik / GMP

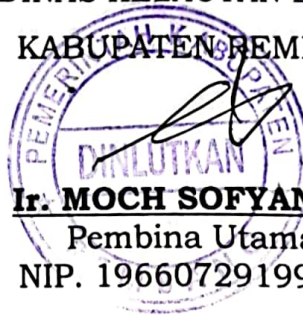
(*Good Manufacturing Practices*) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standar Sanitation Operating Procedure (SSOP)*);

9. Pengembangan usaha produksi garam melalui integrasi lahan, penerapan teknologi dan tata kelola logistik garam;

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda

NIP. 196607291993031004

LAMPIRAN

A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

	Hibah Sarpras Untuk Nelayan Kecil
	Pemberdayaan Nelayan Kecil Melalui Pelatihan
	Rehabilitasi TPI
	Pendampingan Rutin Bulanan

B. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

	Pelatihan dan Pemberian Sarpras Budidaya
	Hibah Sarpras Budidaya Udang Vanamei
	Pemantauan Kesehatan Lingkungan Budidaya
	Pendampingan Rutin Bulanan

C. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

	Pendampingan Penerbitan SKP
	Pemberdayaan Melalui Pembinaan Rutin
	Pemberdayaan Melalui Hibah Sarana dan Prasarana Pengolahan
	Pelayanan Rekomendasi BBM Bersubsidi Untuk Pelaku Utama



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Pemuda No. 82 Telp . (0295) 691331 Rembang 59217

KEPUTUSAN KEPALA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 700/105/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 - 2026

KEPALA KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 156);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaga Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

Pembina Tk. 1

NIP. 19660729 199303 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan
Perikanan Kabupaten Rembang
Nomor : 700/105 /2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021 – 2026**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Pertumbuhan Produksi perikanan	%	1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Nasional	(Persentase peningkatan Produksi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan Tahun n/3)	Olahan Data OPD

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

Pembina Tk. 1

NIP. 19660729 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Pemuda Nomor 82 Telp 0295 6980197

Website: dinlutkan.rembangkab.go.id email: dinlutkan@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.
Jabatan : Bupati Rembang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

Pihak Pertama,

Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP 196607291993031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan :		
1.1	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,5%
2.	Sasaran :		
2.1	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	1%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.514.338.553	APBD
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.320.000.001	APBD
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	620.000.000	APBD
4.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	380.000.000	APBD
Jumlah		7.834.338.554	

Rembang, 20 Januari 2025

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP 196607291993031004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Pemuda No. 82 Telp. (0295) 6980197 Rembang – 59217
Website : dinlutkan.rembangkab.go.id Email : dinlutkan@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 000.8.6.3/ 08 /2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025 PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU adalah :

- a. menyiapkan materi sebagai bahan perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
- b. memfasilitasi perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan dengan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025 dalam bentuk buku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk Anggaran 2026.

Ditetapkan : Rembang
pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Ir. MOCHAMMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Ketua
3	Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Sekretaris
4	Kepala Bidang Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
5	Kepala Bidang Bina Usaha dan Daya Saing Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
6	Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
8	Kepala UPT - TPI Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
9	Kasubbag Tatausaha UPT-TPI Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
10	3 (tiga) Orang Pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR SOP : 000.8.1/ 027.1 /2025
TGL.PEMBUATAN : 08 Januari 2025
TGL.REVISI :
TGL. EFEKTIF : 08 Januari 2025
DI SAHKAN OLEH :

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan
Kabupaten Rembang
DINLUTKAN
Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 196607291993031004

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENGUMPULAN
DATA KINERJA

DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama OPD;
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama OPD;
3. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan OPD;
4. Memiliki pengetahuan tentang perencanaan kinerja;
5. Memahami tentang teknis pengumpulan data kinerja;
6. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN :

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA-OPD);
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-OPD);
3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD);
4. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK-OPD);
5. SOP Monitoring Renstra;
6. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

1. ATK;
2. Komputer;
3. Printer;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD);
5. Instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan,

PERINGATAN :

1. Apabila kegiatan belum berjalan maka pelaksanaan pengumpulan data belum dapat dilakukan dan dicatat NIHIL dalam capaian kinerja;
2. Diperlukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Sekretariat dan Bidang/Seksi yang terkait;
3. Pengumpulan data dilaksanakan setiap bulan sebelum tanggal 10.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Rumusan rencana program, kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ka-OPD	Sekretaris	Kabid/Kasubag/Kasi	Tim Penyusun SAKIP/LKJIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Memerintahkan pengumpulan data kinerja						Struktur organisasi, surat perintah	20 Menit	Disposisi perintah, surat	
2.	Penyusunan anggota tim pelaksana						Draft anggota tim	1 jam	Sk tim	
3.	Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data						SK tim, time schedule	3 hari	Rencan kerja tim	
4.	Menghimpun data kinerja dan menyusun konsep laporan sesuai format yang telah ditentukan						Data dari seksi/ bidang	5 hari	Konsep laporan, data-data	Sesuai dengan SOP Pengukuran Kinerja
5.	Laporan Kabid/Kasubag/Kasi kepada Sekretaris terkait data kinerja masing-masing indikator kinerja						Konsep laporan	1 hari	Konsep laporan, data-data	
6.	Melakukan rapat internal dengan tim SAKIP						Data dan laporan	2 jam	Laporan kinerja dan notulen	
7.	Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan						Draft Laporan data Kinerja	2 jam	Laporan data Kinerja	
8.	Sekretaris melaporkan hasil pengumpulan data kinerja kepada Ka OPD.						Laporan data Kinerja dan lembar disposisi	1 jam	Disposisi Ka-OPD	
9.	Hasil Pengumpulan Data kinerja dikirim kepada Sekretaris Daerah dan BAPPEDA melalui aplikasi atau instrument lainnya kemudian diarsipkan.						Data kinerja yang telah selesai	1 hari	Laporan Kinerja yang sudah siap	